

TAJUK

Mewujudkan Polri “Presisi”

KEPALA Kepolisian RI (Kapolri) yang baru langsung “tanggap gas” sambangi organisasi kemasyarakatan (Ormas). Sinergitas Polri dengan masyarakat bisa mewujudkan pengamanan lingkungan secara swakarsa oleh masyarakat. Menjadi modal utama membangun kondisi tertib sosial. Termasuk mencegah kejahatan dengan tindak kekerasan yang masih meresahkan. Tetapi masih diperlukan peningkatan citra Polri menuju “Presisi” (prediktif, responsif, dan transparansi).

Pencegahan (dan pemberantasan) radikalisme dan terorisme masih menjadi beban utama tupoksi Polri dengan dukungan Koopsus TNI. Sehingga diperlukan penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara. Radikalisme (aliran “kiri” dan ekstremisme “kanan”) biasa muncul dari tengah masyarakat. Maka sinergitas Ormas terbesar (dan terpercaya) bersama Polri, memiliki fungsi strategis.

Radikalisme juga biasa berlingkup di balik HAM (Hak Asasi Manusia). Terutama berkait isu penegakan hukum yang masih terasa timpang, dan kemiskinan. Dalam forum uji kelayakan di hadapan Komisi III DPR Kapolri berjanji, cita penegakan hukum akan memenuhi rasa keadilan di atas hukum materiil. Selain juga harus berjalan lebih efektif, efisien. Secara khusus Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengengahkan tragedi penegakan hukum kasus nenek Minah, November 2009.

Nenek Minah, divonis 1,5 tahun dengan masa percobaan selama 3 bulan, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto (Jawa Tengah). Majelis hakim yang memvonis, juga mencurikan air mata. Serta memberi uang tanda empati. Nenek Minah, terbukti (dan mengakui) perbuatannya, sesuai BAP Kepolisian. Yakni, memetik 3 buah kakao milik perusahaan. Tujuannya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya.

Kasus nenek Minah terjadi bagai drama “parodi hukum” zaman kolonial. Ketahuan mandor perusahaan memetik 3 buah kakao, nenek minta maaf, dan mengembalikannya. Tetapi mandor kebun bersikukuh melaporkan ke Kepolisian. Pada kasus ini Polres gagal menjadi juru damai. Nenek Minah tetap disidik sampai P-21 hingga persidangan usai di Pengadilan Negeri.

Kapolri berjanji, penegakan hukum seperti kasus nenek Minah, dipastikan tidak akan terjadi lagi. Polri harus berhasil me-mediasi kasus hukum sesuai prinsip rasa keadilan. Bahkan dalam penegakan hukum lalu lintas, Polri tidak perlu menilang pelanggaran. Tilang akan dilakukan secara elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*, ETLE). Ini sekaligus mengurangi pelanggaran prosedur polisi di jalan. Serta mengubah citra Polri lebih berwibawa.

Jargon “Presisi” (prediktif, responsif, dan transparansi) akan menjadi panduan utama kinerja Kepolisian RI (Polri). Sudah dimulai ketika Polri menerima legawa hasil investigasi Komnas HAM terhadap peristiwa penembakan anggota ormas terlarang. Polri menindaklanjuti dengan penyidikan dan penyelidikan internal oleh Divisi Propam. Serta kasus suap penghapusan *Red Notice* terhadap buron terpidana kasus korupsi Bank Bali.

Setidaknya selama 5 tahun terakhir Polri telah meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus mengukir prestasi gemilang. Terutama hampir hilangnya kasus “damai” tilang di jalan. Namun yang lebih gemilang, adalah sukses mengamankan rangkaian kegiatan Pemilu 2019 yang mendebarkan. Termasuk sukses menangani kerusuhan menolak hasil pilpres, walau sampai menahan 400 lebih tersangka. Dengan dukungan TNI, dan masyarakat, Polri tidak mundur dari gertakan dan ancaman ketertiban masyarakat.

Pemilu serentak 2019, merupakan pemilu paling kolosal di dunia. Sekaligus paling rumit. Boleh jadi, Polisi seluruh dunia akan belajar pada Polri (Kepolisian Republik Indonesia). Kegaduhan sosial yang menyertai kegiatan Pemilu 2019, telah terjadi sejak pra-pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan sampai ancaman peruntutan sendi ke-negara-an. Tetapi Polri berhasil menanggapi dengan prinsip “Presisi.”

Dukungan TNI, dan masyarakat, akan tetap memperkuat Polri. Sekaligus menjadikan “Presisi” sebagai kelaziman dan inti ke-profesi-an. [*]

Saratan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayanan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau memanfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telepon (untuk konfirmasi ulang).

Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia

PEMBANGUNAN manusia yang berkualitas adalah salah satu kunci utama dari suatu kemajuan negara, menjadi logis adanya jika pembangunan pengkualitas manusia perlu mendapat titik perhatian krusial di negeri ini. Seperti halnya, fokus sasaran pembangunan jangka menengah Indonesia 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Merealisasikan hal tersebut, tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu, kedati dalam situasi pandemi covid-19 pemerintah pun tidak hilang fokus pada pembangunan manusia. Realitas tersebut sebaliknya bisa dikaji dan dianalisis melalui capaian data-data yang ada.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia mengalami peningkatan. Pada 2019, IPM Indonesia mencapai 71,92 meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018. Pada 2020 mencapai 71,94 atau tumbuh 0,03 persen dibandingkan tahun 2019. Ditinjau pada 2021 nilai IPM 73,34, meningkat 0,64 dibandingkan data tahun 2020 yang bernilai 72,70.

Secara kuantitatif data BPS tersebut menunjukkan bahwa IPM mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut belum cukup mencerminkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia sudah tinggi. Pasalnya, merujuk dari data United Nations Development Programme (UNDP) memberikan skor 0,707 untuk Indonesia. Dengan skor ini Indonesia berada di peringkat 6 di Asia Tenggara. Itu artinya, di Asia Tenggara IPM Indonesia masuk dalam kategori relatif rendah.

Rendahnya kualitas SDM tentu berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Disinyalir sistem pendidikan kita masih tertinggal dari negara-negara lain. Mestinya, melalui amanat UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bisa cukup mampu menginspirasi rancangan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan di lapangan. Namun rupanya tidak, akibatnya lembaga pendidikan kita kurang mampu menghasilkan lulusan SDM yang berkualitas, yang berkompeten dan bisa bersaing di pasar kerja global, tentu jika hal tersebut terbiarkan akan berpengaruh pada masa depan IPM di negeri ini.

Masyhud
Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Ada Apa dengan Pamswakarsa?

Pamswakarsa, pasukan pengamanan masyarakat swakarsa hari kembali menjadi perbincangan publik menyusul pernyataan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, pada saat uji kelayakan dan kepatutan di depan Komisi III DPR RI. Polemik menyikapi keinginan menghidupkan kembali Pamswakarsa dilatar belakangi oleh adanya keinginan menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat di satu sisi serta masih adanya trauma akan terjadi seperti tahun 1998 di sisi lain.

Harapan baru kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit setelah dilantik Presiden Joko Widodo adalah hal yang wajar. Dalam sesi *fit and proper test* Jenderal Listyo Sigit menyampaikan beberapa komitmen di antaranya menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi), Menjamin keamanan untuk mendukung pembangunan nasional. Menjaga solidaritas internal. Meningkatkan sinergisitas dan solidaritas TNI Polri, serta bekerjasama dengan APH dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving. Dan yang terakhir setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan.

Dampak pandemi Covid 19 pada sektor ekonomi mengakibatkan meningkatnya kriminalitas serta kasus-kasus intoleransi, radikalisme, diperlukan Kapolri yang tegas juga melindungi. Mengaktifkan kembali pamswakarsa seperti era tahun 1998 akan menjadi momok bagi masyarakat, trauma akan mengemuka jika pamswakarsa itu dihidupkan kembali. Sejarah kelam era tahun 1998 Pamswakarsa adalah kelompok sipil bersenjata yang sengaja dibentuk pemerintah sebagai alat untuk berhadapan dengan para pengunjukrasa anti pemerintah saat pelaksanaan Sidang Istimewa MPR, sehingga pecahlan *Peristiwa Semanggi 1*. Trauma itu masih teringat kuat bagaimana pamswakarsa dibentuk

dan digerakkan untuk alat kekuasaan. Dan kini jika Kapolri akan mengaktifkan kembali pamswakarsa akan menjadi preseden buruk bagi Kepolisian Republik Indonesia. Lalu kemudian dimanakah urgensinya ?

Pandemi Covid 19 dibutuhkan sosok Kapolri yang kuat tegas mengayomi melindungi masyarakat. Menegakkan keamanan ketertiban masyarakat menjadi kebutuhan fundamental, pertanyaannya apakah harus menghidupkan kembali pamswakarsa untuk mewujudkan hal itu. Secara kultural seharusnya pengamanan masyarakat swakarsa sudah melekat di masyarakat. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan, kuncinya adalah kemitraan antara Polisi dan masyarakat.

Pada saat Polri dipimpin Jendral Sutanto berupaya memulihkan citra Polri di mata masyarakat melalui berbagai langkah strategis. Yaitu menerbitkan SK Kapolri No.Pol : Skep/737/X/2005 tentang penerapan model perpolitian masyarakat *community Policing*. Jika kebijakan ini benar-benar diwujudkan dari tingkat Polsek akan meningkatkan citra dan performa Polri. Hal itu sebagai bentuk proses reformasi telah dan sedang berlangsung menuju masyarakat *civil cociety*. Poli yang saat ini sedang dalam reformasi menjadi Kepolisian Sipil harus mau meninggalkan kultur lama yang reaktif dan pendekatan kekuasaan dalam menjalankan tugasnya. Kini harus mampu merubah paradigma baru menuju pendekatan proaktif dan responsif.

Dalam rangka mengemban tugas yang sedemikian berat dengan rasio terbatas, maka Polri secara sistematis harus mampu menggandeng masyarakat. Secara struktural tugas pengayoman, perlindungan memang adalah bagian dari tugas Polri. Akan tetapi secara



Oleh :
Muhammad Fadeli

fungsi masyarakat berkewajiban menempatkan diri turut berpartisipasi bersinergi dengan tugas-tugas Polri. Ketika mengimplementasikan tugas-tugasnya penting artinya Polri mendapat dukungan publik yaitu dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan problem sosial sosial. Jadi jika pamswakarsa dihidupkan kembali maka implementasinya adalah perpolitian masyarakat melalui pendekatan kultural, kearifan lokal.

Sebenarnya konsep Community Policing bukan barang baru dimata masyarakat, karena sejak dulu secara tradisional masyarakat telah melakukan pengamanan dilingkungannya masing-masing dalam bentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling) ada juga Sistem keamanan swakarsa, maupun Babinkamtibmas di Desa-desa.

Pada hakikatnya tujuan Perpolitian masyarakat atau disingkat Polmas adalah terwujudnya kemitraan antara Polisi dan masyarakat lokal. Untuk mencegah maupun mencari jalan keluar atas pemecahannya sehingga penanganan masalah tidak perlu melalui proses hukum formal. Apabila cita-cita ini terwujud maka dampaknya sangat positif bagi Polri akan meringankan beban tugas dan masyarakat sendiri akan merasa memiliki kewajiban menjaga ketentraman bersama.

Dalam kehidupan yang terus berubah seperti itu, polisi tetap diidentikkan dengan kekuasaan, namun kekuasaan di tangan polisi sebagai suatu institusi dari bagian kepentingan publik, bukan kepentingan negara (publik servant atau civil servant). Sehingga kehadiran Polisi dimasyarakat bukan sebagai alat kekuasaan yang menguasai tapi melayani publik. Apalagi jika keberpihakan polisi pada kepentingan politik tertentu maka kehadiran Pamswakarsa akan dipakai sebagai alat kekuasaan. Pemahaman-pemahaman seperti itu adalah menjadi penting bagi Polisi kita agar tidak selalu terkooptasi oleh pemikiran sebuah institusi yang berkuasa atau alat penguasa. Kare-

na Polisi itu dibentuk untuk mengayomi kepentingan rakyat bukan melindungi kekuasaan yang memerintah.

Melalui delapan komitmen Kapolri baru diharapkan lahirnya model kepribadian yang baru (paradigma baru) diharapkan Polisi tampil dalam sikapnya lebih responsif dan bersahabat. Untuk mengubah ke dalam model baru tersebut / *the civilian society* yang dihadapi bukan sebatas ranah struktural dengan merubah Undang-undang saja melainkan masalah yang lebih rumit adalah kultur Polisi. Oleh karena itu jika Pamswakarsa dibentuk kembali seperti era tahun 1998 akan menjadi kontraproduktif.

Transformasi Polri ala Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuju Polri yang Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi dan keadilan). Adalah penting untuk mencegah dan menanggulangi problem kamtibmas, tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri, peran masyarakat adalah sangat penting. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kamtibmas dilingkungan masing-masing harus berbasis kearifan lokal. Kehadiran polisi ditengah masyarakat tidak lebih sebagai mitra.

Dalam melayani dan melindungi masyarakat, polisi akan berhadapan dengan dinamika perkembangan masyarakat yang tidak bisa disamakan antara daerah yang satu dengan yang lain. Implikasinya, sungguh diperlukan cara penanganan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, oleh karena itu perlunya keterlibatan masyarakat.

Kapolri harus bijak dalam mengimplementasikan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 tahun 2020 tentang PAM Swakarsa. Kesalahan dalam memahami dan implementasi pamswakarsa di tingkat paling bawah akan menimbulkan konflik horizontal. Pendekatan Perpolitian Masyarakat atau Polmas *Community Policing*, melalui petunjuk yang jelas kepada seluruh jajaran kepolisian, komunikasi partisipatoris melibatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat menemukan relevansinya di tengah perdebatan pamswakarsa.

Dosen Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Bhayangkara
(Ubhara) Surabaya

Pengembangan UMKM di Tengah Covid-19

Pandemi Covid-19 yang hingga kini tidak kunjung berakhir di Tanah Air, bisa dipastikan akan menambah dampak buruk perekonomian nasional, termasuk pelaku ekonomi. Dalam hal ini adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berpotensi mengalami krisis ekonomi. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Krisis ekonomi yang dialami UMKM tanpa disadari dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional.

Oleh karena itu pembinaan dan bantuan untuk pelaku UMKM di masa pandemi perlu menjadi perhatian banyak sektor terutama lembaga pemerintah, sebagai langkah untuk membangun optimisme dan pendorong pemberdayaan UMKM saat pandemi. Nah, melalui tulisan opini inilah penulis berusaha untuk memproyeksikan pengembangan UMKM di tengah Covid-19, guna membangun kekuatan ekonomi di masa depan.

Membangun Optimisme UMKM

Dunia saat ini, memang sedang menghadapi pandemi Covid-19, tidak terkecuali Indonesia. Masuknya Covid-19 di Indonesia terhitung sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang telah membawa dua mendalam bagi kesehatan dan perekonomian Tanah Air. Pertambahan kasus yang terkonfirmasi pada masa covid-19 ini sangat berpengaruh pada berbagai sektor di Indonesia, salah satunya ialah sektor ekonomi.

Otomatis dalam sektor ekonomi masa pandemi covid-19 ini berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat, tingkat konsumsi yang rendah mengakibatkan turunnya pendapatan rill nasional sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lesu, sebagai akibatnya kondisi resesi tidak bisa terhindari harus terjadi di negeri ini. Sejatinnya, kondisi resesi tersebut hampir bisa dipastikan telah dialami oleh semua negara. Namun, yang paling berbeda keluar dari resesi adalah terletak pada

kedalaman dan kecepatan negara tersebut recovery.

Resesi yang terjadi di negeri ini sejatinya bisa terpecahkan dengan menggunakan kekuatan UMKM, meskipun sejatinya ini sudah bukan hal asing. Bawasannya, UMKM selama ini adalah sumber kekuatan ekonomi nasional. Apalagi, melihat keberadaan UMKM yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia bisa menjadi salah satu pendorong dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Melalui UMKM inilah sekiranya sebagai sumber kebangkitan ekonomi di negeri dari pandemi Covid-19 ini.

Mengingat pula bahwa jumlah UMKM di Indonesia tidaklah sedikit, menurut BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia hingga 64 juta dan menjadi 99,9 persen usaha yang bergerak menopang perekonomian di Indonesia. Dalam pelaniran Kemenkop UKM (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) bahwa terdapat 8 juta UMKM di Indonesia telah menggunakan media online dalam pemasaran produk. Pada jumlah angka UMKM yang bergerak dalam media online tersebut terhitung 13 persen dari total usaha yang beroperasi di Indonesia. Melihat jumlah UMKM di Indonesia yang tidaklah sedikit, pemerintah sejatinya telah turut andil dalam menyusun berbagai skema program pemulihan ekonomi nasional (program PEN) dalam upaya membangkitkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia.

Menurut Kementerian Keuangan (2020) salah satu skema yang diupayakan oleh pemerintah dalam membangkitkan sektor UMKM di masa krisis ekonomi akibat penyebaran virus covid-19 yakni program Pemulihan Ekonomi Nasional atau program PEN. Tidak hanya pada sektor UMKM saja, program PEN berupaya menangani seluruh sektor perekonomian di Indonesia yang terdampak covid-19. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020



Oleh :
Novi Puji Lestari

bahwa pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (program PEN) sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

Berbagai tujuan adalah gaskan dalam program PEN dimana yang paling utama terselenggaranya program PEN ialah usaha untuk menjamin, menaungi, menyelamatkan, memperkukuh, serta mengembangkan kinerja ekonomi para pelaku usaha atau yang sedang merintis usaha selama pandemi covid-19. Harapannya supaya dapat mempertahankan eksistensi UMKM juga membangkitkan kemampuan UMKM dalam perannya terhadap keberlangsungan perekonomian Indonesia.

Mendorong pemberdayaan UMKM

UMKM merupakan salah satu barometer perekonomian nasional. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Sektor UMKM akan menjadi prioritas utama pemerintah dengan menyelenggarakan segala kebijakan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, terlebih di tengah pandemic Covid-19 saat ini. Nah, melalui tulisan ini penulis berusaha memberikan masukan tentang faktor-faktor apa saja yang sekiranya bisa dilakukan agar dapat mendorong pemberdayaan UMKM di tengah pandemi Covid-19.

Pertama, upaya pemerintah untuk terus mengawal pemberdayaan UMKM, melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bagi usaha mikro, pemerintah antara lain memberikan hibah bagi usaha pemula. Di samping itu, pemerintah juga menamban dana LPDB (Lembaga Pengelola

Dana Bergulir) Koperasi dan UKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM.

Kedua, mendukung program vaksinasi. Besar kemungkinan vaksinasi akan berprospek membawa angin segar menggejalatnya perekonomian untuk bangkit dari keterpurukan. Vaksinasi ini merupakan harapan kita untuk bangkit, pulih dari keterpurukan. Sesuai dengan program pemerintah tentang pemulihan ekonomi nasional di segala aspek.

Ketiga, digitalisasi merupakan dorongan agar UMKM dapat bangkit. Pasalnya, perkembangan waktu saat ini telah membawa perubahan zaman yang sangat pesat. Salah satunya, adalah adanya zaman digitalisasi. era digitalisasi ini menjadi panglima dalam dunia bisnis di semua sektor kehidupan. Otomati melihat realitas yang demikian, sudah semestinya UMKM yang ada di negeri ini harus mampu bertransformasi ke ekonomi digital. Hal ini bertujuan untuk tetap mempertahankan partisipasi dan eksistensi usaha. Kondisi itu semakin terbukti dengan adanya mereka pelaku usaha yang terhubung ke dalam ekosistem digital lebih memiliki daya tahan di tengah pandemi Covid-19 bahkan pasca Covid-19.

Keempat, perlu adanya sinergi antar instansi. Baik antar kementerian, pemerintah dengan daerah, maupun pemerintah dengan swasta. Hal ini supaya pelaksanaan program tepat sasaran dan tepat guna, dan betul-betul memberi manfaat bagi pemulihan UMKM saat dan pasca pandemi.

Melalui keempat masukan tentang faktor-faktor yang dapat mendorong pemberdayaan UMKM di tengah pandemi Covid-19 tersebut di atas, besar kemungkinan jika semua pihak berkomitmen dan konsisten serta sungguh-sungguh mengaplikasikan semua itu, maka sasaran pemberdayaan UMKM di negeri ini akan terealisasi dengan baik, dan menjadi kekuatan utama ekonomi Indonesia di masa depan.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN
Bhirawa
Mata Rakyat Mitra Birokrat

PENDIRI :
Alm. H. Moch. Said

PENASIHAT HUKUM :
Poerwanto, SH, MH

PEMIMPIN UMAM: Nawang Esthi Lestari
PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto
REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Sunyo Widodo
KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang RH REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dhimdy, Andre Endryana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad
Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegah Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani
Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh

Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wisno Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi
Jember: Effendi, Sampang: Nur Choliz, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadion, Fathoni, Ari Yulianto
Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Khusyoto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayudi
Gresik: Kerin Ikantno, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarano, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jarkarta: Tjitik Kahyoto.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan: Mira Damayanti
Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadid, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Edy Hariyanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Choliyanti, Sirkulasi: Titeek Yuliatl (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetka: Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendi Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah

Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com
Sirkulasi: Jalan Pengkal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com
Bhirawa Online : http://www.bhirawa.co.id
Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rik:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya
SIUPTP: Nomor 159/JSK/Menpen/SIUPTP/A.7/1986; 22 April 1986.